

**ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PENDAPATAN
MASYARAKAT DI PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT
(NTB)**

Wira Hendri¹ Lalu Rizal Ihwandi²

Universitas Gunung Rinjani
wirahendri@gmail.com¹ rizal71ihwandi@gmail.com²

ABSTRAK

Variabel yang digunakan dalam penelitian ini adalah Pendapatan Asli Daerah, Belanja Daerah dan Pendapatan Masyarakat. Metodologi penelitian ini menggunakan regresi berganda, hasil analisis menemukan secara parsial Pendapatan Asli Daerah tidak berpengaruh signifikan terhadap Pendapatan Masyarakat Provinsi Nusa Tenggara Barat Priode 2017-2020. Secara parsial Belanja Daerah berpengaruh signifikan terhadap Pendapatan Masyarakat Nusa Tenggara Barat Priode 2017-2020. Secara simultan ada pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Belanja Daerah terhadap Pendapatan Masyarakat Provinsi Nusa Tenggara Barat Priode 2017-2020. Hasil dari R-Square adalah sebesar 29,4 % hal ini berarti bahwa 29,4 % variasi nilai pendapatan masyarakat ditentukan oleh peran dari variasi nilai Pendapatan Asli Daerah dan Belanja Daerah. Dengan kata lain kontribusi Pendapatan Asli Daerah dan Belanja Daerah sebesar 29,4%. Sedangkan sisanya 70,6% adalah dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak termasuk dalam penelitian ini seperti pajak daerah, retribusi daerah dan lainnya.

Kata Kunci: Belanja Daerah, PAD, Pendapatan Masyarakat

1. Pengantar

Salah satu tujuan suatu negara adalah untuk meningkatkan pertumbuhan ekonominya. Salah satu ukuran pertumbuhan ekonomi adalah pendapatan nasional. Pendapatan nasional suatu negara dapat menunjukkan seberapa besar aktivitas perekonomian secara keseluruhan. Konsep pendapatan nasional adalah ukuran yang paling sering dipakai sebagai indikator pertumbuhan ekonomi namun bukan satu satunya indikator pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi adalah sebuah proses, bukan merupakan suatu gambaran ekonomi pada suatu periode tertentu, ada perkembangan atau perubahan dan penggunaan waktu (Boediono, 1999). Sementara itu pembangunan daerah merupakan pembangunan yang dimaksud untuk mendorong, memberdayakan masyarakat, menumbuhkan prakarsa serta meningkatkan partisipasi masyarakat dalam rangka membangun daerahnya, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pembangunan yang dilaksanakan daerah meliputi berbagai bidang, salah satunya pembangunan ekonomi. Arsyad (1999) berpendapat bahwa pembangunan ekonomi daerah adalah suatu proses di mana pemerintah daerah dan masyarakat mengelola sumberdaya yang ada dan membentuk suatu pola kemitraan antara pemerintah daerah dengan sektor swasta untuk menciptakan

lapangan kerja yang baru merangsang perkembangan kegiatan ekonomi (pertumbuhan ekonomi) dalam wilayah tersebut. Pembangunan ekonomi merupakan pembangunan yang pada hakekatnya bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat maka diperlukan pertumbuhan ekonomi yang meningkat dan distribusi pendapatan yang lebih merata.

Masalah pertumbuhan ekonomi di suatu daerah tergantung pada banyak faktor, salah satunya adalah kebijakan pemerintah itu sendiri. Kebijakan pemerintah tersebut harus dikenali dan diidentifikasi secara tepat supaya pertumbuhan ekonomi dapat tercapai di suatu daerah. Pertumbuhan ekonomi suatu daerah dapat diukur dengan melihat laju pertumbuhan PDRB atas dasar harga konstan. Pembangunan ekonomi sebuah negara pada dasarnya bertujuan untuk mencapai kemakmuran masyarakat melalui pertumbuhan ekonomi yang tinggi.

Pertumbuhan ekonomi merupakan pertumbuhan output yang dibentuk oleh berbagai sektor ekonomi sehingga dapat menggambarkan bagaimana kemajuan atau kemunduran yang telah dicapai oleh sektor ekonomi tersebut pada suatu periode tertentu. Selain itu, pertumbuhan ekonomi juga menunjukkan sejauh mana aktivitas perekonomian akan menghasilkan tambahan pendapatan masyarakat pada suatu periode tertentu. Begitu juga pembangunan di daerah, sasaran utamanya adalah menciptakan pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pembangunan, termasuk didalamnya pemerataan pendapatan antar daerah. Untuk mencapai sasaran pembangunan tersebut, diperlukan perencanaan pembangunan ekonomi yang baik.

Nusa Tenggara Barat adalah salah satu provinsi di Indonesia yang tidak terlepas dari masalah ketimpangan pendapatan. Provinsi Nusa Tenggara Barat yang terdiri dari 10 kabupaten ini tentu saja memiliki berbagai persoalan yang harus diselesaikan, diantaranya adalah masalah ketimpangan pendapatan. Data PDRB (Produk Domestik Regional Bruto) merupakan salah satu alat ukur keberhasilan pembangunan. Data PDRB dapat dijadikan sebagai dasar penentuan target pertumbuhan ekonomi dan sebagai bahan evaluasi keberhasilan pembangunan yang telah dilakukan. Pengukuran dengan data PDRB dapat menggambarkan besaran alokasi masing-masing dalam menciptakan perekonomian (struktur ekonomi) serta pertumbuhan per kategori disamping pertumbuhan secara total (BPS 2018).

Besarnya PDRB antar Kabupaten di Nusa Tenggara Barat cukup bervariasi. Hal ini disebabkan setiap daerah memiliki keunggulan komparatif yang berbeda, seperti perbedaan tersedianya sumber daya alam, faktor-faktor produksi infrastruktur penunjangnya dan kemampuan sumber daya manusia yang dimiliki wilayah tersebut perbedaan ini mengakibatkan besaran PDRB di setiap daerah berbeda cukup besar.

Pada kenyataannya, masih banyak ditemukan daerah yang mengalami kesulitan dalam melaksanakan pembangunan ekonominya setelah pelaksanaan otonomi daerah melalui Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 mengenai pelimpahan wewenang dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah untuk merencanakan dan mengelola pembangunan daerahnya masing-masing berdasarkan potensi dan sumberdaya yang ada di wilayah yang bersangkutan, serta untuk mengatasi persoalan kemiskinan.

Tabel 1. PDRB Provinsi Nusa Tenggara Barat Atas Dasar Harga konstan, Menurut Kabupaten/Kota (Miliar Rupiah) 2017-2020

Prov/kota	2017	2018	2019	2020
Kab. Lombok Barat	10.432	10.492	10.895	10.124
Kab. Lombok Tengah	11.553	11.917	12.400	11.572
Kab. Lombok Timur	13.324	13.777	14.424	13.978
Kab. Sumbawa	9.587	9.986	10.471	10.038
Kab. Dompu	4.640	4.843	5.059	4.897
Kab. Bima	7.591	7.898	8.234	7.947

Lanjutan

Kab .Sumbawa Barat	19.774	12.938	12.786	16.465
Kab. Lombok Utara	3.313	3.285	3.478	3.219
Kota Mataram	12.464	13.082	13.812	13.052
Kota Bima	2.751	2.881	3.029	2.879
Jml Kab/Kota Total of reg	95.430	91.097	94.587	94.169
PDRB	94.608	90.349	93.870	93.269

Sumber: BPS NTB, 2020

Berdasarkan Tabel 1. Diatas Dapat di lihat bahwa PDRB tertinggi perkabupaten adalah Kabupaten Sumbawa Barat Pada Tahun 2020 Sebesar Rp.16.465 Miliar, dan terendah terdapat di Kabupaten Lombok Timur pada tahun 2020 sebesar 2.879 Miliar, Tinggi nya PDRB Kabupaten Sumbawa Barat disebabkan oleh kontertribusi dalam PAD dan sektor Pertambangan/Penggalian. Sektor penyumbang terbesar berikutnya adalah Sektor Pertanian. Sektor Pertanian merupakan sektor ekonomi strategis di Kabupaten Sumbawa Barat . meskipun nilai tambah sektor pertanian tersebut terhadap PDRB tidak sebesar sektor Pertambangan dan Penggalian, namun penyerapan tenaga kerja pada sektor pertanian merupakan yang tertinggi dibandingkan dengan sektor lainnya.

Sementara terendah di Kota Bima dikarenakan perekonomian disemua lapangan usaha pada tahun 2020 cenderung disebabkan oleh tekanan wabah Covid-19 yang sangat berdampak terhadap perkembangan perekonomian tidak hanya di Kota Bima namun juga berdampak kesemua daerah. Pandemi inilah yang menyebabkan lapangan usaha Perdagangan Besar dan Eceran serta Trasfortasi mengalami pukulan yang sangat besar karena adanya restriksi kegiatan ekonomi dan social dimasyarakat. Rendah nya PAD juga akan mempengaruhi Belanja Daerah yang rendah suatu daerah dikatakan maju adalah daerah yang memiliki pendapatan tertinggi, keberhasilan suatu daerah dalam meningkatkan pendapatannya akan berimplikasi pada peningkatan kemampuan daerah dalam membiayai kebutuhan Belanja Daerah.

Tabel 2 Pendapatan Asli Daerah (PAD) Provinsi Nusa tenggara Barat (dalam Miliar Rupiah)

Prov/Kota	20017	20018	20019	2020
Kab.Lombok Barat	290,993,58	216,921,279	247,115,353	274,456,916
Kab.LombokTengah	286,691,384	187,324,721	204,512,599	225,842,904
Kab.LombokTimur	398,088,460	261,716,109	289,621,500	322,941,235
Kab. Sumbawa	249,526,156	143,943,921	163,931,325	171,830,139
Kab. Dompu	134,347,580	57,094,383	105,458,909	109,349,545
Kab. Bima	188,203,814	120,342,972	135,874,141	153,601808
Kab.Sumbawa Barat	171,632,855	66,810,357	72,869,945	76,739,053
Kab.Lombok Utara	150,949,553	131,074,968	146,771,642	220,559,597
Kota Mataram	386,958,232	176,844505	373,951,422	415,000,000
Kota Bima	52,465,170	46,203,686	50,422,855	62,007,142
Prov. Nusa Tenggara Barat	1,684,468,709	660,300,985	1,807,482,745	844,846,716

Sumber: Direktorat jenderal perimbangan keuangan

Upaya peningkatan penerimaan daerah dengan memberi perhatian kepada perkembangan PAD akan mendorong pemerintah untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan kebutuhan masyarakat. Dengan adanya peningkatan PAD diharapkan dapat meningkatkan investasi belanja modal pemerintah daerah sehingga pemerintah memberikan

kualitas pelayanan publik yang baik menurut (Mardiasmo,2009) mengatakan bahwa semakin tinggi tingkat belanja modal diharapkan mampu meningkatkan partisipasi (kontribusi) publik terhadap pembangunan yang tercermin dari adanya peningkatan PAD.

Perkembangan Kontribusi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten/Kota di Provinsi Nusa Tenggara Barat selama tahun 2017 sampai dengan tahun 2020 mengalami perkembangan yang berfluktuatif. Rata-rata Kontribusi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten/Kota di Provinsi Nusa Tenggara Barat yang terbesar terdapat di Kabupaten Lombok Timur pada tahun 2020 sebesar Rp. 322,941,235, sedangkan yang terkecil terdapat di Kota Bima pada tahun 2020 sebesar Rp. 62,007,142.

Dalam era desentralisasi fiskal diharapkan terjadinya peningkatan pelayanan diberbagai sektor terutama sektor publik. Peningkatan layanan publik ini diharapkan dapat meningkatkan daya tarik bagi investor untuk membuka usaha di daerah. Harapan ini tentu saja dapat terwujud apabila ada upaya pemerintah dengan memberikan berbagai fasilitas untuk investasi. Konsekuensinya, pemerintah perlu memberikan alokasi belanja yang lebih besar untuk tujuan ini. Desentralisasi fiskal disatu sisi memberikan kewenangan yang lebih besar dalam pengelolaan daerah, tetapi disisi lain memunculkan persoalan baru, dikarenakan tingkat kesiapan fiskal daerah yang berbeda-beda (Adi, 2012). Pemerintah Daerah mengalokasikan dana dalam bentuk anggaran belanja daerah dalam APBD untuk menambah aset tetap.

Menurut Penelitian yang dilakukan oleh Putu Adhi Guna wijaya yang berjudul Analisis Faktor-faktor yang Mempengaruhi Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Badung menunjukkan hasil bahwa jumlah penduduk berpengaruh positif dan signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Badung. Artinya semakin meningkat jumlah penduduk di Kabupaten Badung maka semakin meningkat jumlah Pendapatan Asli Daerah di kabupaten tersebut. Variabel terikat dalam penelitian ini adalah pendapatan asli daerah, dan variabel bebas yang di gunakan dalam penelitian ini adalah jumlah kunjungan wisatawan, tingkat hunian kamar hotel, dan jumlah penduduk.

Menurut Penelitian yang dilakukan oleh Nadia Putri Imtiyaz yang berjudul Analisis Faktor-faktor yang mempengaruhi Pendapatan Asli Daerah Pada Sektor Pariwisata di Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah Pada Tahun 2017- 2019. Hasil Penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat 4 faktor utama, yang menjadi penyebab terjadinya faktor-faktor yang mempengaruhi Pendapatan Asli Daerah (PAD) pada sektor pariwisata di Provinsi Jawa Tengah, yang terdiri dari Harga Objek Wisata, Jumlah Penduduk, Jumlah Daya Tarik Wisata dan Jumlah Pengunjung Wisata.

2. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan Kuantitatif. Penelitian kuantitatif adalah Penelitian yang menekankan analisis pada data-data numerical (angka) yang diolah dengan metode statistika (Azwar, 2010). Jenis penelitian ini adalah penelitian asosiatif. Menurut (Sugiyono, 2016), penelitian asosiatif merupakan penelitian yang bertujuan untuk mengetahui ada dan tidaknya pengaruh atau hubungan antara variabel bebas terhadap variabel terikat dan apabila ada seberapa eratnya pengaruh atau hubungan serta berarti atau tidaknya pengaruh atau hubungan itu.

Penelitian ini menggunakan data sekunder yaitu data yang diperoleh secara tidak langsung melalui media perantara. Data diperoleh dengan cara melihat dan menganalisis data dari website Direktorat Jenderal Perimbangan keuangan Kementerian Keuangan (www.djpk.kemenkeu.go.id) dan Badan Pusat Statistik Provinsi Nusa Tenggara Barat (www.ntb.bps.go.id) dimana kumpulan data dari laporan anggaran pemerintah pada periode tahun 2017 sampai dengan tahun 2020. Dalam penelitian ini model dan tehnik analisa data menggunakan pendekatan regresi linier berganda dan regresi dengan variabel moderating. Sebelum menganalisis regresi berganda terlebih dahulu dilakukan uji asumsi

klasik, yang diolah menggunakan software SPSS (*Statistical Package for Social Science*).

Regresi adalah satu metode untuk menentukan hubungan sebab akibat antara variabel dengan variabel-variabel yang lain. Dalam penelitian ini menggunakan regresi berganda untuk menentukan hubungan sebab akibat antara variabel bebas dan variabel terikat.

3. Hasil Penelitian Dan Pembahasan

Metode regresi linear berganda menghubungkan satu variabel dependen dengan beberapa variabel independen dalam satu model. Uji regresi linear berganda digunakan untuk menguji pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Belanja daerah terhadap Pendapatan Masyarakat.

Tabel 3
Hasil Regresi Linear Berganda

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients
		B	Std. Error	Beta
1	(Constant)	-2463.776	5382.001	
	PAD	.004	.011	.054
	Belanja Daerah	.010	.003	.523

Sumber : Hasil pengolahan IBM SPSS

Nilai constan sebesar -2463,776 dengan arah yang negatif menunjukkan bahwa apabila semua variabel independen yaitu Pendapatan Asli Daerah (X1) dan Belanja Daerah (X2) bernilai nol, maka Pendapatan Masyarakat (Y) Provinsi Nusa Tenggara Barat Priode 2017-2020 bernilai -2463,776.

Nilai Pendapatan Asli Daerah (X1), sebesar 004. Dengan arah hubungan yang positif menunjukkan bahwa apabila Pendapatan Asli Daerah ditingkatkan 1 Miliar maka Pendapatan Masyarakat Nusa Tenggara Barat akan mengalami peningkatan sebesar 0,04 Miliar rupiah dengan asumsi bahwa variabel bebas yang lain bernilai konstan.

Nilai Belanja Daerah (X2) sebesar 0,10. Dengan arah hubungan yang positif menunjukkan bahwa apabila Belanja Daerah ditingkatkan 100% maka Pendapatan Masyarakat Nusa Tenggara Barat sebesar 0,010 miliar rupiah dengan asumsi bahwa variabel bebas yang lain bernilai konstan.

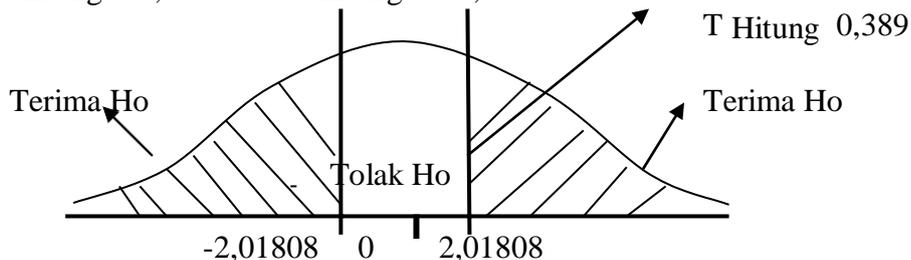
Uji t di gunakan untuk menguji koefisien regresi secara individual, pengujian ini dilakukan untuk mengetahui apakah secara parsial masing-masing variabel bebas mempunyai pengaruh signifikan atau tidak terhadap variabel terikat.

Pengaruh Pendapatan Asli Daerah terhadap Pendapatan Masyarakat Uji t digunakan untuk mengetahui apakah pendapatan asli daerah secara (parsial) mempunyai hubungan yang signifikan atau tidak terhadap pendapatan masyarakat pengolahan data SPSS, maka dapat diperoleh uji t sebagai berikut :

$t \text{ hitung} = 0,389$ $t \text{ tabel} = 2,01808$

H0 diterima jika : $-2,01808 \leq t \text{ hitung} \leq 2,01808$, pada $\alpha = 0,05$

H0 ditolak jika : $t \text{ hitung} > 0,389$ atau $- t \text{ hitung} < - 0,389$



Gambar 1 Kriteria Pengujian Hipotesis Uji t

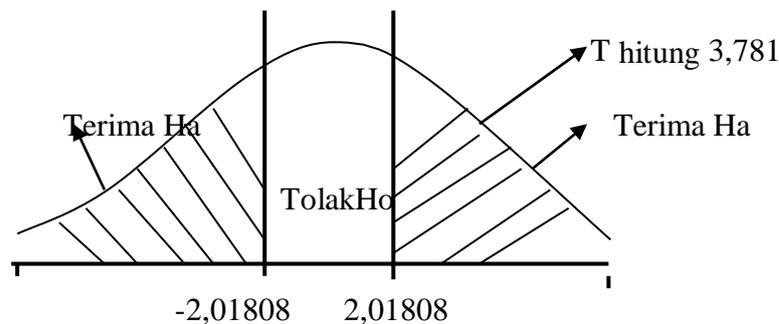
Berdasarkan hasil pengujian secara parsial pengaruh Pendapatan Asli Daerah sebesar 0,389 dan t tabel sebesar 2,01808. Dengan demikian t hitung lebih kecil dari t tabel ($0,389 < 2,01808$) dan mempunyai angka signifikan sebesar $0,699 < 0,05$. Artinya H_0 diterima dan H_a di tolak hal ini menunjukkan bahwa secara parsial tidak ada pengaruh pendapatan asli daerah terhadap Pendapatan Masyarakat.

Pengaruh Belanja Daerah Terhadap Pendapatan Masyarakat Uji t digunakan untuk mengetahui apakah belanja daerah secara parsial mempunyai hubungan yang signifikan atau tidak terhadap pendapatan masyarakat. Dari pengolahan Data SPSS, maka dapat diperoleh uji t sebagai berikut:

t hitung = 3,781 t tabel = 2,01808

kriteria pengambilan keputusan:

H_0 diterima jika : $-2,01808 \leq t \text{ hitung} \leq 2,01808$, pada $\alpha = 0,05$ H_0 ditolak jika : t hitung $> 3,781$ atau $-t \text{ hitung} < -3,781$



Gambar 2 Kriteria Pengujian Hipotesis Uji t

Berdasarkan hasil pengujian secara parsial pengaruh belanja daerah 3,781 dan t tabel sebesar 2,01808. Dengan demikian t hitung lebih besar dari t tabel ($3,781 > 2,01808$) dan mempunyai angka signifikan sebesar $0,001 < 0,05$. Artinya H_0 di tolak dan H_a diterima, hal ini menunjukkan bahwa secara parsial ada pengaruh Belanja Daerah terhadap pendapatan Masyarakat. Nilai t hitung sebesar 3,781 dengan arah hubungan yang positif antar Belanja Daerah terhadap Pendapatan Masyarakat ini menunjukkan kecenderungan meningkatnya Belanja Daerah diikuti dengan meningkatnya Pendapatan Masyarakat Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2017-2020.

Analisis mengenai hasil penelitian ini adalah analisis mengenai hasil penemuan penelitian terhadap kesesuaian teori pendapat maupun penelitian terdahulu yang dikemukakan hasil penelitian sebelumnya serta pola perilaku yang harus dilakukan untuk mengatasi hal tersebut. Berikut ini ada 2 bagian utama yang akan dibahas dalam analisis hasil temuan penelitian ini, yaitu sebagai berikut:

Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh mengenai Pendapatan Asli Daerah terhadap Pendapatan Masyarakat pada Provinsi Nusa Tenggara Barat periode 2017-2020 menyatakan bahwa t hitung lebih kecil dari t tabel ($0,389 < 2,01808$) dan mempunyai angka signifikan sebesar $0,699 > 0,05$. Artinya H_0 diterima dan H_a di tolak hal ini menunjukkan bahwa secara parsial tidak ada pengaruh signifikan Pendapatan Asli Daerah terhadap Pendapatan Masyarakat pada Provinsi Nusa Tenggara Barat Periode 2017-2020. Hal ini disebabkan pemerintah daerah dan aparat pengelola dalam melaksanakan pemungutan pajak dan retribusi daerah masih kurang insentif. Tingginya derajat sentralisasi dalam bidang perpajakan, karena semua jenis pajak utama yang paling produktif baik pajak langsung maupun tidak langsung ditarik oleh pusat. Dan kurang berperannya perusahaan daerah sebagai

sumber pendapatan asli daerah sehingga menyebabkan pendapatan asli daerah tidak berpengaruh terhadap pendapatan masyarakat.

Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh mengenai pengaruh Belanja Daerah terhadap Pendapatan Masyarakat pada Provinsi Nusa Tenggara Barat Periode 2017-2020 menyatakan bahwa t hitung lebih besar dari t tabel ($3,781 > 2,01808$) dan mempunyai angka signifikan sebesar $001 < 0,05$. Artinya H_0 ditolak dan H_a diterima. Hasil uji hipotesis ini menunjukkan bahwa secara parsial ada pengaruh Belanja Daerah terhadap Pendapatan Masyarakat pada Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2017- 2020. Hal ini disebabkan dorongan dari dana perimbangan atau dana yang berasal dari pemerintah pusat seperti dana DAU dan DAK.

Menurut (Halim, 2016) salah satu pengeluaran pemerintah adalah belanja Daerah yang memiliki pengertian pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi. Belanja modal termasuk belanja tanah, belanja peralatan dan mesin, belanja modal gedung dan bangunan, belanja modal jalan, irigasi, dan jaringan, belanja aset tetap.

Pentingnya penyusunan anggaran akan berpengaruh terhadap pendapatan masyarakat yang nantinya juga akan berdampak terhadap kesejahteraan masyarakat, karena dengan adanya peningkatan dalam pertumbuhan ekonomi diharapkan disertai dengan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Pertumbuhan ekonomi yang disertai dengan meningkatnya kesejahteraan masyarakat dapat dilakukan apabila belanja modal dialokasikan secara tepat. Sehingga segala sesuatu hal yang dibutuhkan pada provinsi yang bersangkutan dapat terpenuhi. Maka dari hasil yang diperoleh dapat disimpulkan bahwa hipotesis pertama yaitu Belanja Daerah berpengaruh positif terhadap Pendapatan Masyarakat.

Hasil penelitian (Arini S, 2016), (Sularso&Restianto, 2011) bahwa belanja modal memberikan pengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi. Hasil penelitian terdahulu yang dilakukan oleh (Utami & Indrajaya, 2019) menyatakan bahwa belanja modal berpengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi, hal ini senada dengan penelitian oleh Alexiou (2009, Putra (2016), Waryanto (2017) bahwa belanja modal berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi yang yang berarti bahwa jika belanja modal naik, maka bisa menyebabkan pertumbuhan ekonomi mengalami peningkatan. Namun, berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Fajri (2016) menunjukkan hasil penelitian belanja modal berpengaruh negatif terhadap pertumbuhan ekonomi. penelitian yang dilakukan oleh (Islamiah, 2015), menghasilkan bahwa belanja modal berpengaruh negatif terhadap pertumbuhan ekonomi, hal ini disebabkan oleh belanja modal pemerintah sangat dibatasi oleh sumber penerimaan yang lebih banyak berasal dari pemerintah pusat. sumber penerimaan tersebut lebih banyak tersedot untuk belanja rutin sehingga alokasi anggaran untuk belanja modal pemerintah menjadi terbatas.

4. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dikemukakan sebelumnya maka dapat diambil kesimpulan dari penelitian mengenai Analisis Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Pendapatan Masyarakat di Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2017-2020, maka penulis menyimpulkan sebagai berikut :

Pendapatan Asli Daerah tidak berpengaruh signifikan terhadap pendapatan masyarakat di sebabkan pemerintah daerah dan aparat pengelola dalam melaksanakan pemugutan pajak dan retribusi daerah masih kurang Insentif, tingginya derajat sentralisasi dalam bidang perpajakan, dan kurang berperanya perusahaan daerah sebagai sumber pendapatan asli daerah.

Belanja Daerah berpengaruh signifikan terhadap pendapatan masyarakat disebabkan

dorongan dari dana perimbangan atau dana yang berasal dari pemerintah pusat seperti dana DAU dan DAK. Pendapatan Asli Daerah dan Belanja Daerah berpengaruh signifikan terhadap pendapatan masyarakat, hal ini disebabkan dorongan dari dana perimbangan atau dana yang berasal dari pemerintah pusat.

REFERENSI

- Arini S (2019). Pengaruh Belanja Modal dan Pendapatan Asli Daerah terhadap Investasi Swasta Di Indonesia dengan Pertumbuhan Ekonomi sebagai Variabel Intervening. *JRAMB*, Prodi Akuntansi, Fakultas Ekonomi, UMB Yogyakarta, 5(1), 28–38.
- Azwar, S. (2010) *Metode Penelitian*. Yogyakarta. Pustaka Pelajar.
- Sugiyono (2016). *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung Alfa Beta. Boediono, 1999:8. *Teori pertumbuhan Ekonomi*.
- Baldrick. 2017 *Akuntansi Sektor Publik Edisi 2*. Penerbit UPP STIM YKPN. Yogyakarta.
- Caruni. 2017. *Kebijakan dan Strategi Peningkatan pendapatan Asli Daerah dalam pembangunan Nasional*. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
- Halim, A. (2016). *Akuntansi Sektor Publik Akuntansi Keuangan Daerah*. Jakarta. Salemba Empat.
- Hanum. (2011). Analisis Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Pada Kabupaten Serdang Berdagai. *Jurnal Ilmiah & Bisnis*, 10(02).
- Halim. 2007. *Akuntansi Sektor Publik Akuntansi Keuangan Daerah*. Edisi Ketiga. Jakarta: Salemba Empat.
- Halim. 2004. *Akuntansi Keuangan Daerah*. Edisi Revisi. Jakarta: Salemba Empat.
- Halim dan Nasir. 2006. Kajian Tentang Keuangan Daerah Pemerintah Kota Medan. *Jurnal Manajemen Usahawan* Hal 42. Nomor 06 Th XXXV Juni 2006. Lembaga Management FE-UI. Jakarta.
- Isdijoso. 2002. Analisis Kebijakan Fiskal Para Era Otonomi Daerah (Studi Kasus : Sektor Pendidikan di Kota Surakarta), *Kajian Ekonomi dan Keuangan* Vol 6 No.1.
- Rahardja, Pratama dan Manurung, M. (2008). *Teori Ekonomi Makro (Keempat)*. Jakarta. PT. Rineka Cipta.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah
- Putri, Z. E. (2015). Analisis Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU) dan Inflasi Terhadap Pertumbuhan Ekonomi di kabupaten/kota Provinsi Jawa Tengah. *Jurnal Bisnis Dan Manajemen*, 5(2), 173–186.
- Priambodo, A. (2014). Analisis Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD), Belanja Modal, Dan Tenaga Kerja Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten/Kota Di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008-2012. *Economics Development Analysis Journal*, 3(3), 427–435.
- Siregar. (2017). *Akuntansi Sektor Publik (Kedua)*. Yogyakarta. Penerbit UPP STIM YKPN.
- Samsubar, Saleh. 2003 “Kemampuan Pinjam Daerah Kabupaten dan Kota di Indonesia”, Vol No. 2 Desember 2003 Semarang: Media Ekonomi dan Bisnis.
- Soleh, Rochmansjah. 2010. *Pengelolaan keuangan dan aset Daerah*.
- Sularso, H., & Restianto, Y. E. (2011). Pengaruh Kinerja keuangan Terhadap Alokasi Belanja Modal Dan Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten/Kota Di Jawa Tengah. *Media Riset Akuntansi*, 1(2), 109–124.
- Sulaeman, A. S., & Silvia, V. (2019). Pendapatan Asli Daerah, Transfer Daerah, dan Belanja Modal, Pengaruhnya Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Regional di Indonesia. 4(1), 97–112.
- Sugiyono. 2012. *Metode Penelitian: Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung. Alfabeta.
- Todaro. 2002. *Pembangunan Ekonomi (Kesembilan)*. Jakarta: Penerbit Erlangga. Utami,

- D. N., & Indrajaya, G. B. (2019). Pengaruh Pad Dan Belanja Modal Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Dan Kesejahteraan Masyarakat DiProvinsi Bali. E-Jurnal EP Unud, 8(10), 2195–2225.
- Wardhiah. (2018). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Belanja Modal terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Provinsi Aceh. Jurnal Visioner & Strategis, 7(1), 61–70.